

# Nilai ketuhanan dalam membentuk integritas masyarakat: Analisis sila pertama Pancasila

Muhammad Zaki Fikri

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: 250201110006@student.uin-malang.ac.id

## Kata Kunci:

Integritas, masyarakat, nilai ketuhanan, pancasila, sila pertama.

## Keywords:

Integrity, society, divine values, pancasila, first principle

## ABSTRAK

Sila Pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa", secara ideal merupakan benteng moral yang mengarahkan integritas masyarakat melalui pemahaman spiritual yang mendalam. Namun, realitas saat ini menunjukkan paradoks tajam di mana tingkat religiositas formal yang tinggi tidak berbanding lurus dengan integritas sosial, ditandai dengan maraknya praktik koruptif dan degradasi etika di lingkungan sosial. Secara teoretis, integritas dalam konteks ini perlu dipandang sebagai perilaku ketuhanan yang berbasis tanggung jawab yang menempatkan Tuhan sebagai petunjuk moral tertinggi, melampaui sekadar pengawasan administratif. Urgensi kajian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk mengatasi krisis moral sistemik yang tidak lagi cukup ditangani hanya melalui pendekatan hukum formal tanpa adanya dukungan fondasi etika yang kokoh. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran substantif nilai Ketuhanan dalam membangun integritas kolektif masyarakat serta merumuskan strategi internalisasinya agar nilai Pancasila tidak berhenti pada formalitas, melainkan juga bertransformasi menjadi kompas etika nyata demi mewujudkan kehidupan bernegara yang bersih dan bermartabat.

## ABSTRACT

The first principle of Pancasila, "Belief in the One and Only God," ideally serves as a moral bulwark that guides societal integrity through profound spiritual understanding. However, the current reality demonstrates a sharp paradox where high levels of formal religiosity are not directly proportional to social integrity, marked by rampant corrupt practices and ethical degradation in the social environment. Theoretically, integrity in this context should be viewed as a divine behavior based on responsibility that places God as the highest moral guide, going beyond mere administrative oversight. The urgency of this study lies in the urgent need to address the systemic moral crisis that can no longer be adequately addressed through a formal legal approach without the support of a solid ethical foundation. Therefore, this study aims to analyze the substantive role of the value of the Godhead in building collective societal integrity and formulate a strategy for its internalization so that the values of Pancasila do not stop at formality, but also transform into a real ethical compass for realizing a clean and dignified national life..

## Pendahuluan

Sila Pertama dalam Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa," meletakkan nilai-nilai ketuhanan sebagai fondasi spiritual dan moral tertinggi dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Sila ini bukan hanya sekadar tentang pengakuan terhadap adanya Tuhan, melainkan juga sebuah komitmen yang mengharuskan setiap individu



untuk menginternalisasi sikap ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya membentuk masyarakat yang berintegritas (Rohman, 2024). Setiap warga negara yang berlandaskan Sila Pertama, idealnya memiliki mekanisme pengawasan internal yang sangat kuat karena adanya kesadaran akan kehadiran. Kesadaran ini dapat menjadi alat untuk mencegah individu dari perilaku korupsi, kebohongan, atau memanipulasi, meskipun tanpa adanya pengawasan. Nilai ketuhanan dapat berfungsi sebagai wadah dalam memastikan adanya konsistensi antara tindakan dari lahir maupun keyakinan batin, yang dapat menciptakan harmoni pada bidang spiritual dan profesionalitas. Dengan demikian, Sila Pertama merupakan landasan moral yang dapat membentuk perilaku jujur, sehingga masyarakat memiliki karakter dasar negara yang berintegritas, dan tidak mudah goyah oleh tindakan pragmatisme atau kepentingan material sesaat. Pancasila memiliki cita-cita untuk mewujudkan tatanan sosial yang dimana nilai moralitas ketuhanan menjadi dasar utama dalam setiap pembangunan nasional (Shodiq, 2021).

Indonesia memperkenalkan dirinya sebagai bangsa yang mengakui adanya Tuhan dengan Sila Pertama Pancasila menjadi fondasi utamanya. Namun, pada kenyataannya terdapat beberapa problematika yang sangat bertentangan terkait implementasi nilai ketuhanan dalam membentuk integritas di masyarakat. Sering terjadi masalah pada fenomena religiusitas formalistik, di mana ketaatan dalam praktik keagamaan tidak sejalan dengan internalisasi moral dan etika dalam kehidupan publik. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang ironisnya meliatkan banyak oknum-oknum dengan identitas agama yang kuat (Noer, 2025). Nilai ketuhanan yang seharusnya bisa berfungsi sebagai "alat penyaring" untuk mencegah tindakan yang menyimpang, malahan kini lebih cenderung berubah menjadi sekedar atribut sosial dan politik identitas. Selain itu, sikap materialisme dan pragmatisme yang kuat menyebabkan standar integritas menjadi relatif di masyarakat, dimana kesuksesan dalam finansial lebih dihargai daripada karakter yang jujur dan bermartabat. Kesenjangan antara praktik keagamaan dan rendahnya integritas ini menunjukkan bahwa Nilai ketuhanan belum cukup optimal sebagai upaya penguatan karakter bangsa. Kurangnya keterkaitan antara Nilai Ketuhanan dan integritas dikhawatirkan Sila Pertama kehilangan makna sebagai dasar etika dari berbagai hal yang dapat menghabat integritas nasional (Ernita & Sari, 2025).

Penerapan Nilai Sila Pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa," dalam membangun integritas yang ada pada masyarakat saat ini telah mencapai titik urgensi yang sangat krusial. Adanya krisis moral di masyarakat menunjukkan bahwa antara identitas religius bangsa dengan realitas perilaku sosial antar individu mengalami ketimpangan satu sama lain, yang dimana hal ini tentu bertentangan dan tidak sesuai dengan Nilai Sila Pertama Pancasila (Noer, 2025). Penelitian ini penting karena menunjukkan fakta bahwa pengawasan dan penerapan hukum secara formal tidak terbukti cukup kuat untuk menangani praktik korupsi, kolusi, dan manipulasi yang telah menjadi akar perilaku menyimpang di masyarakat. Nilai ketuhanan tidak hanya berfungsi sebagai simbol atau identitas negara, tapi juga harus menjadi dasar pandangan dalam beretika. Apabila hal tersebut tidak terwujud, maka Sila Pertama Pancasila hanyalah dasar negara semata yang tidak mempunyai kekuatan dalam membentuk karakter individu dan bangsa Indonesia hanya kan menjadi bangsa yang terjebak pada lingkaran

paradoks "masyarakat religius yang tidak berintegritas," sebuah keadaan yang dimana pada akhirnya merusak moral bangsa dan melemahkan keadilan sosial secara perlahan (Parulian, 2024).

Tujuan dari jurnal penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam terkait efektivitas serta nilai pada Sila Pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa", sebagai fondasi beretika dalam membentuk integritas masyarakat di Indonesia dari berbagai macam tantangan moral yang kontemporer. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana cara nilai-nilai ketuhanan dapat dirubah dari yang awalnya hanya sekedar identitas negara yang formal menjadi sebuah alat yang mampu mengatur individu maupun kelompok dalam bertingkah laku secara mandiri (Sriwidodo, 2023). Kajian ini berupaya untuk membantu masyarakat dalam mengatasi hal-hal yang menghambat terbentuknya integritas yang sesuai dengan nilai ketuhanan. Diharapkan analisis ini dapat memberikan kontribusi secara teoritis bagi pengembangan etika dalam politik dan sosiologi yang berbasis Pancasila, serta dapat memberikan rekomendasi bagi lembaga pemerintahan terutama di bidang pendidikan dalam mengatur strategi untuk memperkuat karakter bangsa. Oleh karena itu, penelitian ini membuktikan bahwa membentuk karakter individu yang bersumber dari Nilai Sila Pertama merupakan fondasi penting dalam meminimalisir praktik korupsi dan penyimpangan, sehingga integritas tidak akan lagi dipandang sebagai beban regulasi, melainkan manifestasi demi mewujudkan masyarakat yang berbangsa dan bernegara (Pernando et al., 2024).

## **Pembahasan**

### **Landasan Ketuhanan Sebagai Sumber Moralitas Publik**

Nilai Sila Pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam kehidupan bernegara memiliki makna sebagai sumber moral yang mendasari tata perilaku masyarakat, sehingga bangsa Indonesia tidak hanya sekedar negara yang berpolitik, tapi juga amanah yang diberikan Tuhan untuk membuat rasa aman bagi setiap warganya. Sila ini memberikan batasan bagi setiap aparatur negara dan warga negara agar selalu menyadari bahwa setiap kebijakan, dan perilaku dalam masyarakat memiliki hal yang harus dipertanggungjawabkan. Hal tersebut menjadikan nilai ketuhanan sebagai dasar etika yang memastikan bahwa setiap kekuasaan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Keberadaan Sila Pertama ini menjamin bahwa demokrasi dan hukum di Indonesia harus beradab dan sesuai dengan moralitas, sehingga hukum atau aturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang bersumber dari ajaran Tuhan (Hamdan & Masyitoh, 2025). Makna tersebut bertindak sebagai ikatan sosial antar pemeluk agama, di mana setiap pemeluk agama merasa bahwa mereka memiliki kewajiban untuk berkontribusi pada bangsa sebagai bentuk rasa iman. Maka dari itu, Nilai Sila Pertama berfungsi sebagai inti dalam membangun kehidupan berbangsa yang adil dan makmur sesuai dengan ajaran Tuhan Yang Maha Esa (Rohman, 2024).

Baik secara individu maupun kolektif, nilai etika dengan ketuhanan mempunyai hubungan dalam membentuk integritas masyarakat yang kuat karena menempatkan tingkah laku yang berlandaskan tanggung jawab ketuhanan. Secara individu, nilai

Ketuhanan yang ada dalam Sila Pertama Pancasila berfungsi sebagai hati nurani yang menuntun setiap individu untuk selalu bertindak jujur, adil, dan amanah bukan karena takut pada hukum, melainkan karena kesadaran diri bahwa Tuhan Maha Melihat. Kesadaran moral individual ini menciptakan karakter yang tulus dan berintegritas, di mana kejujuran akan menjadi karakter diri yang tidak akan goyah oleh materialisme atau kesempatan untuk melakukan penyimpangan saat tidak ada pengawasan (S & As, 2024). Nilai Ketuhanan akan bertransformasi menjadi etika dalam publik yang mempersatukan beragam agama dengan latar belakang berbeda-beda ke dalam satu kesatuan moral sosial yang sama, yaitu kebaikan bersama yang sesuai dengan perintah Tuhan. Ketika nilai ini dapat tertanam di masyarakat, akan menciptakan lingkungan yang berbasis pada rasa saling percaya dan tanggung jawab, serta membentuk ikatan sosial untuk menjaga kebenaran serta keadilan dalam masyarakat (Murdiansyah, 2025). Hubungan ini menegaskan bahwa religiositas berbasis nilai akan melahirkan masyarakat yang dengan rasa saling peduli terhadap sesama, sehingga membentuk moral sosial yang berlandaskan nilai ketuhanan untuk mewujudkan masyarakat yang berintegritas (Utama et al., 2026).

### **Kesenjangan Antara Keyakinan Dan Perilaku**

Fenomena masyarakat religius disertai dengan tingkat integritas yang rendah merupakan sebuah masalah sosiologis yang menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai ketuhanan dan sosial dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Permasalahan ini berawal dari keberagaman yang bersifat formalistik, di mana nilai-nilai Ketuhanan yang ada dalam Sila Pertama Pancasila sering kali hanya dianggap sebagai identitas, dan pemenuhan kewajiban ibadah saja, tanpa menjadikan nilai etik untuk menuntun perilaku kehidupan sehari-hari (Muhamad et al., 2024). Dalam kondisi ini, moral mengalami kontradiksi di mana individu hanya mampu menunjukkan ketaatan kepada tuhan di tempat peribadatan, namun pada saat yang sama kehilangan arah ketika dihadapkan dengan materi, kekuasaan, atau praktik korupsi di ruang publik. Rendahnya integritas yang ada di masyarakat menunjukkan bahwa konsep menyadari Tuhan yang selalu mengawasi setiap tindakan belum terinternalisasi dengan baik ketika dihadapkan dengan materialisme. Akhirnya, agama sering kali disalahgunakan sebagai citra sosial, daripada alat untuk mencegah praktik penyimpangan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendidikan karakter yang tidak hanya berfokus pada aspek ibadah keagamaan, tetapi juga pada penguatan integritas sebagai realisasi iman, sehingga nilai ketuhanan bangsa tidak lagi bersifat semu, melainkan mampu menciptakan lingkungan masyarakat yang jujur, amanah, dan memiliki integritas yang selaras dengan Nilai Pertama Pancasila (Vaneza et al., 2024).

Paradoks antara nilai ketuhanan dengan integritas masyarakat yang rendah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti budaya yang permisif, kepentingan pragmatis, tekanan sosial, serta lemahnya keteladanan dari elit kekuasaan. Budaya permisif cenderung menormalisasi penyimpangan kecil yang dianggap lumrah, menyebabkan perilaku menyimpang seperti korupsi tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai ketuhanan. Ditambah adanya sikap materialisme dan dominasi dalam masyarakat membuat individu mengesampingkan nilai-nilai Sila Pertama untuk kepentingan sesaat (Utama et al., 2026). Selain itu, lumpuhnya integritas personal juga bisa disebabkan oleh

tekanan sosial dari lingkungan sekitar atau kelompok juga sering kali memaksa seseorang untuk melakukan hal yang tidak etis demi solidaritas semu. Faktor-faktor ini semakin mengakar kuat akibat para pemimpin dan tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat malah menunjukkan sikap ketidakselarasan dengan nilai-nilai Sila Pertama, sehingga masyarakat cenderung melakukan pembenaran atas tindakan yang serupa. Oleh karena itu, rendahnya integritas di masyarakat bukan hanya disebabkan oleh kegagalan pada nilai agama itu sendiri, melainkan bisa juga karena oleh faktor lingkungan yang lebih menghargai hasil daripada prinsip etika. Hal tersebut juga menandakan bahwa penerapan Sila Pertama Pancasila belum terinternalisasi dengan baik di masyarakat (Sriwidodo, 2023).

### **Internalisasi Nilai Ketuhanan Dalam Membentuk Integritas**

Pendidikan karakter dalam membentuk integritas bukan hanya sekedar melalui doktrin atau rutinitas, tetapi juga harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang bersifat umum dan terbuka. Dalam Sila Pertama, pendidikan karakter yang berbasis Pancasila memiliki tujuan untuk mengubah nilai ketuhanan menjadi etika publik yang hakiki, di mana sikap amanah dan jujur diajarkan sebagai perwujudan dari moralitas (Farwati et al., 2023). Pendekatan ini sangat penting agar para peserta didik tidak hanya menghafal teks-teks tentang keagamaan tanpa memahami relevansi sosialnya, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai ketuhanan kedalam pribadi yang berintegritas sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan sekaligus kewajiban sebagai warga negara. Nilai yang menjunjung tinggi Pancasila akan menciptakan pendidikan karakter yang menjadikan siswa mampu membangun kesadaran untuk membedakan antara integritas murni atau hanya sekedar formalitas (Priatmoko, 2023). Dengan menekankan nilai-nilai luhur pada Pancasila, dimensi keberagaman yang ada di sekolah akan lebih beradab dan berperikemanusiaan, menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk tidak melakukan korupsi ataupun penyimpangan. Strategi ini dapat menjadi pelindung utama dalam menghadapi tantangan moral, karena ia membantu generasi muda dengan menunjukkan etika untuk tetap konsisten pada kebenaran di tengah lingkungan yang mungkin kurang tegas terhadap penyimpangan di masyarakat, sehingga integritas menjadi karakter yang terbentuk dalam identitas kebangsaan mereka (Sutomo, 2021).

Memandang integritas sebagai sebuah praktik keagamaan merupakan langkah yang mendasar untuk menyingkirkan paradigma dari yang awalnya kepatuhan semu menjadi kesadaran moral yang mendalam dan independen (Muhamad et al., 2024). Dalam sudut pandang Sila Pertama Pancasila, integritas tidak boleh dipandang sebagai ketaatan terhadap aturan saja, melainkan juga harus dipahami sebagai bentuk pengabdian nyata yang menghubungkan tindakan manusia dengan Tuhan-Nya. Ketika ada seseorang yang menjadikan kejujuran sebagai bentuk ketaatan batin, maka ia akan mempunyai tanggung jawab yang tetap akan terjaga meskipun tidak adanya pengawasan dari manusia atau masyarakat, karena ia yakin bahwa setiap perilaku yang dilakukannya selalu berada dalam pengamatan Tuhan Yang Maha Esa. Pendekatan ini dapat membentuk integritas menjadi bagian dalam individu, di mana perilaku yang menyimpang tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai bentuk pengkhianatan terhadap hakikat manusia dan hubungan dengan Sang Pencipta. Pengalihan nilai integritas ke dalam tingkah laku memungkinkan nilai-nilai Pancasila

dapat terinternalisasi dan membentuk karakter yang kuat dan konsisten dalam menghadapi tantangan materialisme. Dengan demikian, integritas tidak lagi dirasa sebagai aturan yang mengikat, melainkan sebuah keperluan batin untuk mencapai keseimbangan antara iman dan perbuatan, yang pada akhirnya akan menciptakan tatanan masyarakat yang sesuai dengan tujuan Pancasila (Salsabila et al., 2023).

## Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa Sila Pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa", memiliki peran sentral dan determinan sebagai fondasi moral yang mampu mentransformasi integritas masyarakat dari sekadar kepatuhan hukum menjadi kesadaran spiritual yang mendalam. Analisis menunjukkan bahwa integritas yang autentik hanya dapat terwujud apabila individu memiliki akuntabilitas transendental, yakni kesadaran akan pengawasan Tuhan yang melampaui sistem pengawasan manusia atau institusi formal. Meskipun saat ini terdapat paradoks berupa religiositas formalistik yang tidak berbanding lurus dengan perilaku jujur, hal tersebut bukan disebabkan oleh kegagalan nilai Ketuhanan, melainkan akibat lemahnya internalisasi nilai substantif dan dominasi budaya pragmatisme. Integritas harus dipahami sebagai sebuah praktik spiritual (*spiritual practice*) yang menghubungkan antara keyakinan batin dan tindakan nyata, sehingga setiap perilaku koruptif dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap esensi kemanusiaan dan iman. Dengan menempatkan nilai Ketuhanan sebagai jangkar etis, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai kompas moral yang mampu melahirkan masyarakat yang jujur, amanah, dan berkarakter kuat dalam menghadapi tantangan degradasi moral di era modern.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan adanya reorientasi strategis dalam sistem pendidikan karakter di Indonesia agar tidak hanya terjebak dalam aspek dogmatis-ritualistik, tetapi lebih menekankan pada internalisasi nilai-nilai Pancasila yang aplikatif dan universal di semua jenjang pendidikan. Pemerintah dan institusi terkait perlu merumuskan kebijakan yang memperkuat budaya integritas di lingkungan kerja melalui pendekatan spiritualitas yang inklusif, sehingga kejujuran menjadi standar profesionalisme yang tidak dapat dinegosiasikan. Selain itu, keteladanan pemimpin dan figur publik menjadi kunci utama dalam memutus mata rantai budaya permisif; para elit kekuasaan harus mampu menunjukkan sinkronisasi antara identitas religius dan kebijakan yang transparan serta adil guna memulihkan kepercayaan publik. Masyarakat juga diharapkan untuk membangun kontrol sosial yang lebih ketat terhadap perilaku menyimpang dan tidak lagi memberikan toleransi terhadap praktik ketidakjujuran sekecil apa pun. Saran terakhir ditujukan bagi peneliti selanjutnya untuk mengeksplorasi lebih jauh mengenai pengaruh literasi digital terhadap persepsi nilai-nilai Ketuhanan dan integritas di kalangan generasi Z, guna merumuskan pola komunikasi nilai Pancasila yang lebih efektif di tengah arus informasi yang serba cepat dan sering kali mengaburkan batas etika.

## Daftar Pustaka

- Ernita, T., & Sari, Y. (2025). Etika Anti Korupsi dan Integritas Kehidupan Politik. 8, 249–260.
- Farwati, S., Iskhak, M., & Mahnun, N. (2023). Integrating Pancasila in Character Education : A Qualitative Analysis of Ethical Values for Nation-Building. 3(2), 201–213. <https://doi.org/10.14421/hjie.2023.32-06>
- Hamdan, N., & Masyitoh, S. (2025). Ketuhanan dalam Era Pluralisme : Relevansi Sila Pertama Pancasila dalam Kebijakan Negara.
- Muhamad, A., Nasoha, M., Atqiyah, A. N., & Puranita, R. C. (2024). Pancasila Sebagai Sistem Etika : Analisis Nilai-Nilai Fundamental dan Implementasinya di Indonesia.
- Murdiansyah, I. (2025). Pentingnya Spirit Pancasila Benteng Penahan Gempuran Globalisasi. <https://repository.uin-malang.ac.id/23881/>
- Noer, H. H. (2025). Religion and Anticorruption Governance in Indonesia. 08(December), 250–266.
- Parulian, A. M. (2024). Ketuhanan dan Keadaban Sosial : Membangun Nilai-Nilai Moral di Tengah Krisis Sosial. 3.
- Pernando, O. R., Amelia, I., & Putri, N. A. (2024). Penerapan Nilai Nilai Etika dan Pancasila Untuk Mewujudkan Kehidupan Anti Korupsi di Kalangan Generasi Z.
- Priatmoko, S. (2023). Pembentukan Karakter Religius Siswa Sekolah Dasar Melalui Implementasi Budaya Sekolah. 4(2), 98–115. <https://repository.uin-malang.ac.id/15792/3/15792.pdf>
- Rohman, A. (2024). Relevansi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Dengan Pengamalan Tauhidullah Bagi Masyarakat Muslim di Indonesia. 2, 302–319.
- S, H. A., & As, N. (2024). The Role of Pancasila as a Political Ethical System : Understanding Indonesia ' s Ideological Foundation and Moral Guidance. 2(3), 95–98.
- Salsabila, Tanjung, Y., & Lukitoyo, P. S. (2023). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Melalui Toleransi Umat Beragama di Kalangan Mahasiswa. 11(April), 43–50.
- Shodiq, M. (2021). Quranic Moral in Pancasila : Efforts to Strengthen Mental Revolution Through the First Principle of Pancasila. 27(1), 139–158.
- Sriwidodo, J. (2023). Internalization of Pancasila Values as an Effort to Prevent Corruption in Indonesia. 3(3), 1–11. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.io>
- Sutomo, S. (2021). Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Untuk Menumbuhkan Sikap Nasionalisme. <https://repository.uin-malang.ac.id/10819/1/10819.pdf>
- Utama, R. A. F. Y., Pratama, F. Z. M. Z. D., & Fadilla, W. R. (2026). Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Konteks Toleransi Antarumat Beragama di Indonesia Modern. 2(1), 1390–1398.
- Vaneza, A. P., Islam, U., Sultan, N., Kasim, S., Islam, U., Sultan, N., Kasim, S., Sari, D. P., Islam, U., Sultan, N., Kasim, S., Andestiko, R., Studi, P., Matematika, P., Tarbiyah, F., Keguruan, D., Negeri, I., Syarif, S., Riau, K., ... Riau, P. (2024). Etika Pancasila Sebagai Panduan Moral Bagi. 1(5), 312–320.